

Relationship between Floating Net Cage Farmers and Bosses in Haranggaol Horisan, Simalungun Regency, North Sumatra, Indonesia

Uly Artha Saragih¹, Erond L.Damanik²
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Korespondensi Email : ulyarth4@gmail.com

Abstract:

The study aims to understand the forms of social and economic relationships between floating net cage (FNC) farmers and bosses (tauke), as well as their impact on farmers' welfare and the management of fair and sustainable FNC enterprises in Haranggaol Horisan Village, Simalungun Regency. The research employs a qualitative method with a descriptive approach through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consist of independent FNC farmers, FNC farmers partnered with bosses, members of fisheries associations, and the local village head. The results show two main types of relationships between farmers and bosses: bonded partnership relations and independent relations. Farmers who are bound to tauke experience a high level of dependency since all production needs are supplied by the tauke under a post-harvest payment system, while the selling price of fish is unilaterally determined by the tauke, weakening the farmers' bargaining position. Conversely, independent farmers possess greater economic autonomy but face higher market risks. Such unequal relationships create a socio-economic structure that benefits the tauke while disadvantaging small-scale farmers. This study recommends strengthening farmers' institutions through the establishment of cooperatives, government intervention in price regulation and access to capital, and ensuring transparency in partnership agreements to create more equitable relationships, improve farmers' welfare, and maintain the economic sustainability of fisheries in the Haranggaol Horisan area.

Keywords: relations, socio-economic, floating net cage, bosses

Abstrak

Penelitian bertujuan memahami bentuk hubungan sosial dan ekonomi antara petani keramba jaring apung (KJA) dengan tauke serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan pengelolaan usaha KJA yang adil dan berkelanjutan di Kelurahan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri atas petani KJA mandiri, petani KJA bermitra dengan tauke, anggota asosiasi perikanan, dan lurah setempat. Hasil penelitian menunjukkan dua bentuk relasi utama antara petani dan tauke, yaitu relasi kemitraan terikat dan relasi mandiri. Petani yang terikat dengan tauke mengalami ketergantungan tinggi karena seluruh kebutuhan produksi di pasok oleh tauke dengan sistem pembayaran setelah panen, sedangkan harga jual ikan ditentukan sepihak oleh tauke sehingga posisi tawar petani menjadi lemah. Sebaliknya, petani mandiri memiliki otonomi ekonomi yang lebih besar namun menghadapi risiko pasar yang tinggi. Relasi yang timpang tersebut membentuk struktur sosial ekonomi yang lebih menguntungkan pihak tauke dan merugikan petani kecil. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi, intervensi pemerintah dalam pengaturan harga dan akses modal, serta transparansi dalam perjanjian kemitraan untuk

menciptakan hubungan yang lebih setara, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga keberlanjutan ekonomi perikanan di kawasan Haranggaol Horisan.

Kata kunci: relasi, sosio-ekonomi, keramba jaring apung, tauke

Pendahuluan

Danau Toba, khususnya wilayah Haranggaol Horisan di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia memiliki potensi perikanan yang signifikan. Salah satu bentuk budidaya perikanan yang berkembang pesat di daerah ini adalah keramba jaring apung (KJA). KJA merupakan bangunan terapung berupa kerangka dari bahan yang kuat, biasanya besi atau kayu yang di balut dengan jaring (Harefa, 2021). Budidaya ikan pada KJA di Haranggaol terdapat berbagai jenis ikan, seperti ikan nila (*Tilapia*), ikan mas (*Cyprinus carpio*), ikan lele (*Clarias batrachus*) dan jenis ikan lainnya. Menurut Andriani, Hasibuan, Damanik, dan Hasibuan (2023), sistem budidaya KJA pertama kali dipraktikkan di Indonesia pada 1980-an di Jatilihur, Jawa Barat.

KJA merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan produksi perikanan dengan memanfaatkan potensi perairan danau, sungai dan lainnya (Siregar, Kusai dan Nugroho, 2020). KJA di Haranggaol Horisan telah menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat setempat, memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian. Berdasarkan hasil pendataan lapangan yang dikompilasi peneliti perhitungan terbaru menunjukkan dengan total 7.184 unit KJA; data ini dikumpulkan sebagai bagian dari penelitian lapangan yang dilaporkan pada 2025 dan mengacu pada kondisi aktual akhir 2024–awal 2025. Menurut Adam (2023), praktik budidaya KJA tidak hanya bergantung pada keahlian teknis dan sumber daya alam, tetapi juga pada peran tauke atau pengusaha modal yang menyediakan modal usaha, pakan ikan, dan kebutuhan produksi lainnya.

Relasi antara petani KJA dan tauke (*bosses*) bersifat saling ketergantungan (*mutual*), di mana petani ikan membutuhkan modal dan dukungan dari tauke untuk menjalankan budidaya, sementara tauke memperoleh keuntungan dari hasil produksi ikan yang di jual. Namun, hubungan ini juga menimbulkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Ketergantungan petani ikan terhadap tauke menimbulkan ketimpangan kekuasaan dan risiko eksploitasi, terutama dalam hal pembagian keuntungan dan pengaturan harga pakan serta hasil panen. Selain itu, masalah lingkungan dan regulasi pemerintah terkait pengelolaan KJA turut mempengaruhi keberlangsungan usaha dan relasi antara petani ikan dan tauke.

Seiring berjalannya waktu, keinginan tauke semakin meningkat dari segi ekonominya. Keinginan untuk menguasai pasar dan mematikan usaha petani kecil, serta meraup keuntungan secara pribadi adalah problematika yang sedang terjadi sekarang ini, hal ini disebut monopoli. Menurut Dikjaya, Saputra, dan Nasrullah (2022) monopoli merupakan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha. Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Pada akhirnya, banyak masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah menjadi bahan olahan yang digunakan para *tauke* ikan untuk memperkaya diri dan memperluas bisnisnya.

Melalui observasi awal yang dilakukan dengan salah satu Anggota Asosiasi Dearma Haranggaol Horisan yaitu Jefri Antony Purba pada 10 Februari 2025 menjelaskan bahwa tauke memonopoli tiga komponen utama dalam proses produksi petani KJA, yaitu benih, pakan, dan harga jual ikan. Monopoli benih terjadi karena petani terikat tidak

diperbolehkan membeli benih dari pemasok lain sehingga harus menerima harga yang lebih tinggi, yaitu selisih Rp50 per ekor dibandingkan petani mandiri. Selain itu, tauke juga menguasai distribusi pakan dengan menetapkan harga yang lebih mahal sebesar Rp15.000 per karung. Monopoli terakhir terlihat pada penentuan harga jual ikan, di mana tauke bertindak sebagai satu-satunya pembeli hasil panen petani terikat dan menetapkan harga yang lebih rendah, yakni selisih Rp500 per kilogram.

Ketiga bentuk penguasaan tersebut menunjukkan adanya praktik monopoli yang menyebabkan petani berada pada posisi tawar yang lemah dan mengalami kerugian secara ekonomi. Selain perbedaan harga, praktik disparitas yang dilakukan tauke tidak hanya terlihat dari selisih nilai benih, pakan, dan harga jual ikan, tetapi juga dari mekanisme transaksi yang sepenuhnya dikendalikan oleh tauke. Petani terikat wajib membeli seluruh kebutuhan produksi benih dan pakan dari tauke melalui sistem hutang yang dibayar ketika panen, sehingga mereka tidak memiliki kebebasan memilih pemasok lain yang lebih murah. Harga masing-masing komponen ditentukan sepihak oleh tauke tanpa proses tawar-menawar, sehingga petani berada pada posisi tawar yang lemah.

Di sisi lain, hasil panen petani terikat juga wajib dijual kembali kepada tauke dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Selain itu, petani terikat tidak memiliki akses ke jaringan pasar yang lebih luas dan secara sosial tidak berani menjual ke pembeli lain karena adanya hubungan ketergantungan modal. Dengan demikian, disparitas harga bukan hanya berupa selisih Rp. 50 per ekor pada benih, Rp. 15.000 per karung pakan, dan Rp. 500 per kilogram pada harga jual ikan, tetapi juga mencerminkan bentuk monopoli tauke terhadap seluruh rantai produksi dan distribusi yang membuat petani terikat mengalami kerugian secara struktural. Uraian di atas menunjukkan pentingnya kajian mendalam mengenai relasi antara petani KJA dan tauke di Haranggaol. Tujuannya untuk memahami interaksi sosial-ekonomi, dampaknya terhadap kesejahteraan petani, dan bagaimana pengelolaan usaha KJA ditata agar lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami bentuk hubungan sosial dan ekonomi antara petani KJA dan tauke di Kelurahan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan secara mendalam realitas sosial yang terjadi di lapangan, termasuk dinamika ketergantungan dan bentuk kerja sama yang terbentuk antara kedua pihak. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan kawasan budidaya ikan air tawar di Danau Toba dengan jumlah petani KJA yang cukup besar.

Pemilihan lokasi didasarkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada usaha KJA dan adanya relasi ekonomi yang kuat antara petani dan tauke dalam sistem produksi dan distribusi ikan. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan data sehingga mendapatkan informan sejumlah 15 orang. Informan terdiri atas petani KJA mandiri, petani yang bermitra dengan tauke, anggota asosiasi perikanan, serta Lurah Haranggaol Horisan.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan budidaya ikan, pola kerja

sama antara petani dan tauke, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Danau Toba. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak terstruktur agar informan dapat menjelaskan pengalaman serta pandangan mereka secara terbuka mengenai relasi kemitraan, sistem bagi hasil, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung, berupa catatan lapangan, foto kegiatan budidaya, data produksi ikan, serta dokumen dari lembaga terkait.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan tahapan analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi diseleksi dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan hubungan sosial ekonomi antara petani dan tauke. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menggambarkan pola relasi yang terbentuk di masyarakat Haranggaol Horisan.

Hasil dan Diskusi

1. Sejarah singkat KJA di Haranggaol

Secara geografis, Haranggaol Horisan adalah sebuah teluk yang terletak di tepi Danau Toba dengan kondisi topografi berbukit dan berada pada ketinggian sekitar 900–1.300 mdpl, sehingga memiliki iklim sejuk dan cocok untuk kegiatan perikanan air tawar. Kecamatan ini dihuni oleh sekitar 6.213 jiwa dengan mata pencaharian yang beragam, seperti pembudidaya KJA, nelayan tangkap danau, petani lahan kering terutama kopi, jeruk, dan jagung, serta pedagang lokal.

Kondisi geografis yang mendukung dan sebagian besar penduduk yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan membuat Haranggaol berkembang sebagai sentra budidaya ikan air tawar di Danau Toba. Adapun jenis ikan yang dibudidayakan pada KJA adalah ikan Nila (*Tilapia*) dan Ikan Mas (*Cyprinus carpio*). Melalui wawancara dengan Ketua Asosiasi Dearma Haranggaol Horisan yaitu Bapak Chandra Purba pada 12 September 2025 menjelaskan bahwa munculnya KJA di Kecamatan Haranggaol Horisan adalah pada 1993 yang dimulai dengan memelihara ikan mas. Sebelumnya, budidaya ikan tersebut dilakukan pada kolam darat (*sabah*) yang terletak di belakang rumah ataupun perladangan. Biasanya, ikan mas bukan jenis ikan yang di konsumsi setiap hari, melainkan pada momen tertentu yakni pada ritual dan upacara peralihan (*rites of passage*) seperti perkawinan (*marhajabuan*), pemakaman (*marujunggoluh*), atau jenis pesta-pesta lainnya (Damanik, 2023; 2018; 2016).

Pada 1993, ikan dipelihara tidak mulai dari benih, melainkan membeli ikan yang sudah besar kemudian dijual kembali. Bisa dikatakan bahwa budidaya ikan di Haranggaol hanya sebatas *transit* saja, hal ini didapatkan melalui hasil wawancara dengan ketua asosiasi Dearma Haranggaol Horisan yaitu Bapak Chandra Purba pada tanggal 12 September 2025. Oleh sebab itu para petani ikan tersebut tidak terlalu tergantung pada pakan ternak yaitu pelet seperti sekarang ini. Seiring berjalannya waktu, terjadi perkembangan pemeliharaan ikan mas yaitu karena mulai banyak pembeli dan kebutuhan yang meningkat untuk pesta-pesta adat Simalungun. Masyarakat mulai menambah kolam di belakang rumahnya lagi dan untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan mempunyai ide untuk membuat keramba di tepi Danau Toba menggunakan bambu yang diikat atau dirakit dan diberi net atau jaring. Gambar 5 di bawah ini adalah foto KJA pada 1996.



Gambar 1. KJA di Haranggaol pada 1996
Sumber: Dokumentasi riset, 2025

Melalui wawancara dengan Ketua Asosiasi Dearma Haranggaol Horisan, Chandra Purba pada tanggal 12 September 2025 menjelaskan juga bahwa pada 1995, mulai muncul ide-ide dari luar dan ide dari orang pakan yang berasal dari Jatiluhur, Jawa Barat untuk membuat KJA menggunakan drum dan rangka besi lalu posisinya digeser mengarah ke perairan yang lebih dalam seperti sekarang ini. Hal itu terjadi karena mereka melihat bahwa Haranggaol memiliki potensi yang besar untuk melakukan budidaya ikan. Pada awalnya, masyarakat memulai dengan 1 (satu) keramba dan seiring berkembangnya KJA pada 1995 menjadi sekitar 50 KJA.

Bentuk keramba pada awalnya masih sederhana dengan kotak-kotak kecil dengan ukuran 5 x 5 m yang dibagi menjadi 4 kotak. Melalui perkembangan yang terjadi jumlah kotak KJA bertambah > 100 kotak dan hingga saat ini sudah ada 7.184 kotak keramba yang dimiliki oleh 313 kepala keluarga dengan ukuran KJA yang bervariasi, tetapi umumnya itu ukuran 5 x 5 m. Luas danau yang dipakai untuk budidaya KJA itu bisa dikatakan setengah dari luas Teluk Haranggaol terutama yang mengarah dari Horisan hingga pelabuhan, serta setengah lagi digunakan untuk keperluan pariwisata terutama yang mengarah ke Horisan dan Sigumba-gumba. Melalui hasil wawancara dengan ketua asosiasi Dearma Haranggaol Horisan yaitu Bapak Chandra Purba pada tanggal 12 September 2025. Hasil panen yang diperoleh dari petani KJA diperkirakan sekitar 50 ton per hari yang dipasarkan ke Kabanjahe, Saribudolok, Tigarunggu, Pamatangraya, Pamatangsiantar, Tebingtinggi, termasuk Medan.

Saat ini, terdapat 313 petani ikan dengan total 7.184 unit KJA sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 pada lampiran. Berdasarkan hasil tabel di atas Kelompok petani ikan tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu petani besar, petani menengah, dan petani kecil, Petani besar yaitu para petani ikan yang memiliki 50 kotak KJA atau lebih. Para petani besar pada umumnya mempunyai modal yang besar sehingga produksi ikan

relatif tinggi yang kemudian membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk mengelolanya. Melalui data pada tabel tersebut, terlihat bahwa petani besar terdiri dari 30 orang yang mempunyai 50-421 kotak dengan total 3034 yang aktif. Petani menengah yaitu para petani yang memiliki sekitar 21-49 kotak KJA. Para petani menengah ini memiliki modal menengah dan skala produksinya menengah sehingga biasanya dikelola bersama keluarga. Melalui data pada tabel tersebut, dapat dilihat petani menengah terdiri dari 64 orang dengan total 2.051 kotak KJA yang aktif. Kemudian, petani kecil yaitu para petani yang memiliki kurang dari 20 kotak KJA. Petani kecil memiliki modal yang terbatas sehingga skala produksinya kecil dan pengelolaannya lebih banyak bermitra dengan tauke. Melalui data pada tabel tersebut, dapat dilihat petani kecil terdapat sebanyak 219 orang dengan total 1.997 kotak KJA yang aktif. Gambar 2 adalah salah satu KJA yang menunjukkan budidaya dan pembesaran ikan. Mas di Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun.



Gambar 2. Pakan ikan pada KJA di Haranggaol
Sumber: Dokumentasi riset, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan budidaya ikan dengan sistem KJA di Haranggaol Horisan memiliki variasi dalam jumlah kepemilikan, luas lahan, hingga hasil produksi yang diperoleh setiap periode panen. Rata-rata penjualan ikan oleh petani dipengaruhi oleh jumlah keramba yang dimiliki, jenis ikan yang dibudidayakan, serta kondisi pasar pada saat panen. Omset yang diperoleh petani besar umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan petani menengah dan kecil, karena skala produksi yang lebih luas. Berikut pada Tabel 1 di bawah ini perkiraan rata-rata budidaya KJA untuk petani menengah ke bawah di Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun pada 2024.

Tabel 2. Rata-rata budidaya KJA menengah ke bawah di Haranggaol Horisan.

, Komponen	Perkiraan rata-rata	Keterangan
Lama panen	5-7 bulan	Periode panen cenderung lebih lama karena pakan yang digunakan bisa jadi kurang optimal atau frekuensi

		pemberiannya tidak seintensif petani skala besar.
Jumlah kolam/petak	1-49 petak (ukuran 3x4m, 4x4m, 5x5, dan variasi ukuran lainnya)	Skala usaha yang umum untuk petani perorangan atau keluarga dengan modal terbatas.
Rata-rata produksi	1.500-3.000 kg/kotak	Poduksi per petak cenderung lebih rendah dibandingkan dengan petani skala besar karena manajemen budidaya yang berbeda.
Omset kotor (pendapatan)	Rp.35.000.000 – Rp.70.000.000/ siklus	Omset kotor yang dihasilkan dari satu siklus panen (sekitar 6 bulan), disesuaikan dengan perkiraan produksi dan harga jual.
Pendapatan bersih	Rp.5.000.000 – Rp.15.000.000/ siklus	Pendapatan setelah dikurangi biaya operasional seperti benih, pakan, dan upah (jika ada). Keuntungan ini sangat bervariasi.
Harga jual rata-rata	Rp.23.000/kg (ikan nila) Rp,29.000/kg (ikan mas)	Harga jual relatif sama dengan petani lain, karena harga ditentukan oleh pasar.

Sumber: Hasil riset, 2025

Budidaya ikan di KJA menjadi tumpuan ekonomi bagi banyak masyarakat di Haranggaol Horison, termasuk bagi para petani skala menengah ke bawah. Meskipun data spesifik tidak tersedia, tabel di atas memberikan gambaran realistis mengenai kondisi yang mungkin mereka hadapi. Bagi petani menengah ke bawah, lama panen cenderung memakan waktu lebih lama, yaitu antara 5 hingga 7 bulan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan modal untuk membeli pakan berkualitas tinggi secara terus-menerus. Pakan yang kurang optimal dapat memperlambat pertumbuhan ikan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai berat panen yang ideal. Petani dalam kategori ini umumnya mengelola 1 hingga 2 petak KJA. Dengan skala yang lebih kecil, produksi ikan per siklus panen juga lebih sedikit, berkisar antara 1.500 hingga 3.000 kg per petak. Angka ini jauh di bawah produksi petani skala besar yang bisa mencapai ribuan kilogram per siklus.

Dengan produksi yang lebih terbatas, omset kotor yang dihasilkan petani menengah ke bawah berada di kisaran Rp. 35 juta hingga Rp. 70 juta per siklus panen. Setelah dikurangi biaya operasional, pendapatan bersih yang tersisa berkisar antara Rp. 5 juta hingga Rp.15 juta per siklus. Meskipun angka ini terlihat kecil, pendapatan ini sangat berarti bagi keluarga petani sebagai penopang kehidupan. Perlu diingat, angka ini sangat bervariasi karena biaya pakan menjadi komponen pengeluaran terbesar yang sangat dipengaruhi oleh harga di pasar. Secara keseluruhan, meskipun modal dan skala usaha terbatas, budidaya KJA tetap menawarkan potensi keuntungan yang menjanjikan bagi petani di Haranggaol Horisan. Namun, keberlanjutan usaha ini sangat bergantung pada manajemen biaya yang cermat, efisiensi penggunaan pakan, serta kemampuan petani untuk menghadapi fluktuasi harga pasar. Program pemerintah atau pendampingan dari lembaga terkait dapat sangat membantu petani skala kecil ini untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Melalui wawancara dengan Ketua Asosiasi Dearma Haranggaol Horisan yaitu Chandra Purba pada 23 September 2025 menjelaskan bahwa pembelian pakan ikan diperoleh dari pabrik pakan di Medan dan Pulau Jawa, baik melalui *delivery order* (DO)

ke pabrik yaitu PT. Charoen Pokphand di Kawasan Industri Medan II, PT. Japfa Comfeed Indonesia di Kawasan Industri Medan I, PT. Mabar Feed Indonesia dan PT. Cargill Indonesia yang berada di Kawasan Industri Medan I. Ada juga dari Pulau Jawa yaitu PT. De Heus Indonesia di Bekasi dan PT. Sinta Prima Feedmill di Bogor, biasanya dilakukan oleh *tauke* karena sudah memiliki modal yang besar. Kemudian para *tauke* membagi pakan kepada petani yang bermitra dengan mereka, dan mereka juga menjual kepada petani ikan mandiri tetapi dengan sistem tunai (*cash*). Lalu, ada juga yang membeli dari agen atau distributor, biasanya ini dilakukan oleh para petani mandiri. Kalau pakan yang dari Jawa itu diproses atau diambil agen dari pabrik, kemudian agen itu menjual kepada para petani ikan.

2. Relasi sosio-ekonomi petani KJA dengan Tauke di Haranggaol

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa hubungan sosial dan ekonomi antara petani KJA dan *tauke* di Haranggaol terbagi menjadi dua bentuk utama; (1) petani mandiri dan, (2) petani yang terikat atau bermitra dengan *tauke*. Sebagian besar petani memilih bermitra karena keterbatasan modal awal untuk memulai usaha budidaya. Dalam sistem kemitraan ini, *tauke* berperan penting dengan menyediakan kebutuhan produksi seperti pakan, bibit ikan, serta bantuan uang tunai untuk biaya operasional. Sebagai konsekuensinya, petani diwajibkan menjual seluruh hasil panen kepada *tauke* dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Beberapa petani yang diwawancarai, seperti D. Sinaga (51 tahun) dan A.S (49 tahun), menyatakan bahwa kerjasama dengan *tauke* sangat membantu dalam pengembangan KJA milik mereka. Bantuan yang diberikan mencakup penyediaan pakan dan bibit dengan sistem pembayaran hasil panen kembali kepada *tauke*. Meskipun hubungan yang terjalin bersifat kekeluargaan dan didasari rasa saling percaya tanpa perjanjian tertulis, posisi tawar petani tetap lemah karena tidak memiliki kendali terhadap harga jual ikan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi sosial yang tampak harmonis tetap menyimpan ketimpangan ekonomi yang signifikan. Di sisi lain, sejumlah petani berupaya melepaskan diri dari ketergantungan tersebut dengan menjadi petani mandiri. Mereka menggunakan modal pribadi atau dukungan keluarga untuk mengelola KJA, serta menjual hasil panen langsung ke pabrik atau pasar lokal.

Seorang petani mandiri, J. Purba (51 tahun) mengungkapkan bahwa setelah keluar dari sistem kemitraan pada 2020, kondisi ekonominya membaik karena ia dapat mengatur hasil penjualan dan keuangannya secara lebih bebas. Namun, menjadi petani mandiri juga memiliki risiko tinggi, terutama terhadap fluktuasi harga pasar. Hal ini ditegaskan oleh D. Saragih (53 tahun) yang menjelaskan bahwa ketika harga ikan di pasar menurun, seluruh kerugian harus ditanggung sendiri karena tidak ada pihak lain yang menanggung beban biaya produksi. Selain aspek ekonomi, hubungan antara petani dan *tauke* juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Beberapa petani memandang *tauke* bukan semata-mata sebagai mitra bisnis, melainkan bagian dari jaringan sosial yang saling bergantung.

Dari sisi *tauke*, hubungan ini dianggap sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan perlu dijaga untuk menjaga keberlanjutan usaha. Seorang *tauke*, T. Sinaga (35 tahun), menegaskan bahwa mereka membantu petani ketika menghadapi kesulitan, namun sebagai imbalannya, petani tetap diharapkan menjual hasil panennya kepada *tauke*. Hubungan ini mencerminkan pola timbal balik yang dilandasi solidaritas sosial, tetapi secara struktural tetap menempatkan petani dalam posisi subordinat

terhadap tauke. Dengan demikian, relasi sosio-ekonomi antara petani KJA dan tauke di Haranggaol menunjukkan adanya pola ketergantungan yang kompleks. Pada satu sisi, tauke berperan penting dalam menopang keberlangsungan usaha petani melalui dukungan modal dan distribusi hasil panen.

Namun di sisi lain, sistem ini menciptakan ketimpangan dalam pembagian keuntungan serta melemahkan posisi tawar petani kecil. Sementara itu, petani mandiri menghadapi tantangan tersendiri dalam hal pembiayaan dan risiko pasar, meskipun memiliki kebebasan ekonomi yang lebih besar. Tabel 2 di bawah ini menggambarkan bagaimana petani KJA menjalin hubungan sosio-ekonomi dengan tauke. Bentuk relasi ini bervariasi, mulai dari ketergantungan hingga kemandirian, yang dipengaruhi oleh status petani dan pernyataan utama mereka terkait modal, harga, dan kebebasan dalam berbudidaya serta menjual hasil panen.

Tabel 2. Bentuk relasi sosio-ekonomi petani KJA dengan tauke.

No	Informan	Status	Pernyataan utama	Bentuk relasi
1	D. Sinaga	Petani terikat	"Kami terbantu modal dan pakan, tapi harga ditentukan tauke."	Patron-klien, ketergantungan harga
2	A. S	Petani terikat	"Hubungan dekat dengan tauke, tapi tidak bisa tentukan harga sendiri."	Relasi kekeluargaan, subordinasi ekonomi
3	J. Purba	Petani mandiri	"Sejak mandiri saya bisa lebih berkembang dalam budidaya KJA ini. Dan untuk penjualan pun saya bebas kemana saja."	Relasi bebas, risiko modal besar
4	D. Saragih	Petani mandiri	"Kalau harga ikan jatuh, pendapatan menurun drastis."	Mandiri, rentan pasar
5	R. Purba	Petani mandiri	"Kalau mandiri memang lebih bebas, bisa jual langsung ke pabrik."	Mandiri, kontrol pasar
6	P. Simarmata	Petani mandiri	"Dulu terikat, sekarang mandiri, lebih bebas mengatur hasil panen."	Mandiri, pengalaman patron-klien
7	E. Sinaga	Petani terikat	"Pendapatan rendah, hasil panen langsung dipotong hutang."	Patron-klien, lingkaran hutang
8	T. Sinaga	Tauke	"Saya sediakan bibit dan pakan, hasil panen dijual ke saya."	Tauke sebagai patron
9	J. Saragih	Petani terikat	"Sudah 20 tahun, tapi usaha tidak berkembang."	Patron-klien jangka panjang
10	P. H	Petani terikat	"Harga ikan selalu ditentukan tauke."	Patron-klien, dominasi harga
11	G. Sinaga	Tauke	"Saya bermitra dengan 4 petani, sistemnya jual hasil ke saya."	Patron dengan klien terbatas
12	K. Sinurat	Tauke	"Meneruskan usaha ayah, bermitra dengan 10 petani."	Patron keluarga, kontrol distribusi
13	C. Purba	Ketua Asosiasi	"Asosiasi sekarang vakum, padahal dulu bisa menengahi."	Relasi kolektif yang melemah
14	R. Sinaga	Lurah	"KJA penting, tapi banyak tantangan, terutama harga."	Relasi pemerintah-masyarakat

15	A. Saragih	Petani mandiri	"Penghasilan pas-pasan, sehingga membuat usaha lain juga, seperti membuka toko dan kolam pancing."	Mandiri, rentan pasar
----	------------	----------------	--	-----------------------

Sumber: Riset 2025.

3. Dampak Relasi Terhadap Kesejahteraan Petani KJA

Relasi antara petani KJA dan tauke di Haranggaol memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan petani. Dari hasil wawancara, dampak ini dibagi menjadi dua kelompok besar, petani terikat tauke dan petani mandiri. Bagi petani terikat dengan tauke cenderung menghadapi kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup. Sebagian besar hasil panen mereka digunakan untuk membayar hutang modal yang diberikan tauke. Akibatnya, penghasilan bersih yang diperoleh sangat kecil dan tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi petani yang terikat dengan tauke, peningkatan taraf hidup relatif sulit dicapai karena sebagian besar hasil panen harus digunakan untuk melunasi utang modal kepada tauke. Hal ini menyebabkan pendapatan bersih yang diterima petani menjadi sangat kecil dan seringkali tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Seperti diungkapkan oleh E. Sinaga (33 tahun), setiap kali panen, sebagian besar hasil penjualan ikan langsung dipotong untuk membayar utang pakan, bibit, maupun kebutuhan rumah tangga sebelum panen, sehingga hanya tersisa sedikit untuk digunakan. Kondisi serupa juga dialami oleh J. Saragih (52 tahun), yang telah menjalankan usaha KJA sejak 2003 dengan 16 kotak keramba. Ia menjelaskan bahwa meskipun jumlah keramba cukup banyak, keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi, terutama ketika harga ikan turun drastis. Ketika kerugian terus terjadi, ia akhirnya menghentikan usaha KJA pada tahun 2023 karena merasa tidak ada perkembangan ekonomi yang berarti.

Sebaliknya, petani mandiri menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan pasar dan harga jual hasil panen, sehingga dapat memperoleh keuntungan lebih tinggi dibandingkan petani yang bermitra dengan tauke. Informan R. Purba (41 tahun) menjelaskan bahwa dengan menjual ikan langsung ke pabrik pengolahan, harga yang diterima lebih tinggi dan hasilnya lebih menguntungkan. Namun demikian, sistem ini tetap memiliki risiko, terutama ketika harga ikan di pasar turun, sehingga pendapatan ikut menurun. Hal serupa diungkapkan oleh D. Saragih (53 tahun), bahwa keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada kondisi pasar. Saat permintaan tinggi, keuntungan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi ketika harga turun, pendapatan tidak cukup untuk menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan.

Di sisi lain, relasi ini justru membawa keuntungan ekonomi bagi para tauke. Dengan menguasai distribusi pakan dan pembelian hasil panen, tauke memperoleh keuntungan yang stabil serta pasokan ikan yang terjamin. Informan T. Sinaga (35 tahun) menjelaskan bahwa ia membantu para petani dengan menyediakan bibit dan pakan, dan sebagai imbalannya, hasil panen dijual kembali kepadanya. Sistem ini menjaga keberlangsungan usaha dan memberikan keuntungan yang cukup, meskipun tetap dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Pernyataan serupa disampaikan oleh G. Sinaga (38 tahun), yang bekerja sama dengan empat petani sebagai mitra tetap.

Melalui kerja sama tersebut, ia memperoleh pasokan ikan yang stabil dan usaha dapat berjalan secara berkesinambungan dengan pola saling menguntungkan. Tabel 3 di bawah menyajikan dampak relasi antara petani KJA dan tauke terhadap kesejahteraan

petani. Dampak ini diukur berdasarkan status petani (terikat atau mandiri) dan dampak yang mereka rasakan, seperti penentuan harga, keuntungan, dan pendapatan, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.

Tabel 3. Dampak relasi petani KJA tauke terhadap kesejahteraan.

No	Informan	Status	Dampak yang dirasakan	Keterangan
1	D.Sinaga	Terikat tauke	Harga ditentukan tauke, keuntungan terbatas	Kesejahteraan rendah
2	A. S	Terikat tauke	Tidak bebas menentukan harga, meski usaha cukup lama	Kesejahteraan stagnan
3	J. Purba	Mandiri	Pendapatan meningkat sejak mandiri	Kesejahteraan membaik
4	D.Saragih	Mandiri	Pendapatan menurun jika harga jatuh	Rentan pasar
5	R. Purba	Mandiri	Lebih sejahtera bila harga stabil	Stabil tapi tergantung pasar
6	P.Simarmata	Mandiri	Lebih bebas, tidak lagi terikat hutang	Sejahtera lebih baik
7	E. Sinaga	Terikat tauke	Hasil panen habis untuk bayar hutang	Sangat rentan, tidak sejahtera
8	T. Sinaga	Tauke	Usaha berkembang, kontrol modal & distribusi	Sejahtera tinggi
9	J. Saragih	Terikat tauke	Usaha tidak berkembang meski puluhan tahun	Stagnan
10	P. H	Terikat tauke	Terikat harga tauke, pendapatan tidak meningkat	Kesejahteraan rendah
11	G. Sinaga	Tauke	Bermitra dengan petani, mendapat keuntungan	Stabil dan berkembang
12	K. Sinurat	Tauke	Bisnis keluarga berkembang	Stabil dan makmur
13	C. Purba	Ketua Asosiasi	Petani kehilangan wadah perjuangan harga	Kesejahteraan kolektif terhambat
14	R. Sinaga	Lurah	Pemerintah desa kesulitan mengendalikan harga	Dampak makro, tidak langsung
15	A. Saragih	Mandiri	Penghasilan pas-pasan, sulit berkembang	Cukup, tapi tidak meningkat

4. Mekanisme Pengelolaan Keberlanjutan KJA

Relasi antara petani KJA dan *tauke* di Haranggaol belum sepenuhnya menciptakan keadilan bagi kedua pihak. Sebagian besar petani merasa tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga jual, sementara *tauke* menganggap peran mereka sebagai penyedia modal tidak bisa diabaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 informan, terdapat tiga gagasan utama untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan; (1) penguatan kelembagaan petani, keterlibatan pemerintah, dan transparansi kemitraan dengan *tauke*. Banyak petani menilai bahwa kelembagaan kolektif seperti koperasi atau asosiasi perlu diaktifkan kembali agar posisi tawar petani menjadi lebih kuat. Saat ini asosiasi petani KJA di Haranggaol sedang vakum, sehingga petani tidak memiliki wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Hal ini disampaikan oleh C. Purba (48 tahun), Ketua Asosiasi Dearma Haranggaol, yang menjelaskan bahwa dahulu asosiasi berperan penting sebagai tempat bertukar informasi, memperjuangkan harga yang adil, serta menjadi mediator antara petani dan pedagang.

Namun, saat ini asosiasi tersebut tidak lagi aktif sehingga peran tersebut hilang. Selain itu, informan juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur harga ikan dan memberikan subsidi pakan. Tanpa regulasi yang jelas, harga ikan cenderung dikendalikan oleh *tauke* dan menempatkan petani pada posisi yang lemah. Lurah Haranggaol, R. Sinaga (48 tahun), menegaskan perlunya aturan harga yang melibatkan seluruh pihak agar harga ikan lebih stabil dan adil, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan usaha KJA dapat berjalan secara berkelanjutan.

Mekanisme lain yang dianggap penting; (2) perbaikan sistem kemitraan antara petani dan *tauke*. Kedua belah pihak menyadari perlunya aturan yang lebih jelas agar tidak menimbulkan konflik. Beberapa *tauke* bahkan menyatakan bahwa perjanjian tertulis perlu dibuat agar hak dan kewajiban kedua pihak seimbang. Hal ini disampaikan oleh K. Sinurat (33 tahun), seorang *tauke* di Haranggaol, yang menilai bahwa sistem kemitraan masih relevan namun perlu dijalankan secara lebih transparan dan adil, sehingga baik petani maupun pedagang dapat memperoleh keuntungan yang wajar; (3) kemitraan yang transparan dengan *tauke* harus dibangun melalui kontrak tertulis yang jelas, sehingga tidak terjadi dominasi sepihak dan relasi usaha dapat berlangsung secara adil. Apabila ketiga elemen tersebut dijalankan secara simultan, maka hubungan antara petani dan *tauke* akan lebih setara.

Selain itu, keberlanjutan usaha KJA di Haranggaol juga dapat terjamin, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Tabel 4 menyajikan pandangan dan harapan para petani KJA terkait mekanisme pengelolaan usaha agar dapat berjalan adil dan berkelanjutan. Dalam tabel ini, terlihat perbedaan perspektif antara petani yang berstatus terikat dengan *tauke* dan yang mandiri, mulai dari keinginan harga jual yang lebih adil, harapan agar *tauke* tidak sepenuhnya mengendalikan harga, dorongan untuk kemandirian petani, hingga kebutuhan dukungan pemerintah dan koperasi untuk memperkuat posisi petani dalam usaha KJA.

Tabel 4. Mekanisme pengelolaan keberlanjutan KJA

No	Informan	Status	Pandangan / Harapan
1	D. Sinaga	Terikat <i>tauke</i>	Ingin ada harga jual yang lebih adil
2	Agus Sugiono	Terikat <i>tauke</i>	Berharap <i>tauke</i> tidak sepenuhnya mengendalikan harga
3	J. Purba	Mandiri	Mendorong petani lain mandiri agar lebih bebas
4	D. Saragih	Mandiri	Ingin pemerintah ikut menstabilkan harga
5	R. Purba	Mandiri	Harap ada koperasi petani untuk membeli pakan bersama
6	P. Simarmata	Mandiri	Perlunya dukungan modal agar petani bisa mandiri
7	E. Sinaga	Terikat <i>tauke</i>	Ingin ada alternatif selain bergantung pada <i>tauke</i>
8	T. Sinaga	<i>Tauke</i>	Sistem kemitraan tetap jalan, tapi butuh kejelasan kontrak
9	J. Saragih	Terikat <i>tauke</i>	Berharap ada intervensi pemerintah soal harga
10	Pa Hongkia	Terikat <i>tauke</i>	Ingin ada keadilan dalam pembagian keuntungan
11	G. Sinaga	<i>Tauke</i>	Perlu kesepakatan tertulis dengan petani
12	K. Sinurat	<i>Tauke</i>	Ingin usaha berlanjut tapi dengan aturan jelas
13	C. Purba	Ketua Asosiasi	Asosiasi harus diaktifkan kembali untuk memperkuat posisi petani
14	R. Sinaga	Lurah	Perlu regulasi dan kebijakan harga dari pemerintah atas
15	A. Saragih	Mandiri	Ingin ada koperasi agar pemasaran lebih kuat

5. Pembahasan Penelitian

Relasi petani KJA dengan *tauke* di Kecamatan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu bentuk relasi sosial dan ekonomi, dampak terhadap kesejahteraan petani, dan mekanisme pengelolaan usaha yang adil dan berkelanjutan. Bentuk relasi sosial antara petani KJA dan *tauke* terbentuk melalui hubungan yang telah lama terjalin dan menciptakan rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan ini memudahkan petani dalam memperoleh bantuan pakan dan bibit. Bantuan tersebut menumbuhkan rasa kepercayaan dan ketergantungan petani terhadap *tauke*, sementara bagi *tauke* menciptakan loyalitas dari pihak petani. Hal ini sesuai dengan teori patron-klien oleh James C. Scott (1972), di mana klien bergantung pada patron untuk memperoleh akses sumber daya, sedangkan patron memperoleh loyalitas dari klien.

Selain relasi sosial, terdapat pula relasi ekonomi yang terbentuk karena kebutuhan modal dan akses pasar. Sebagian besar petani KJA belum memiliki modal cukup untuk membeli pakan dan bibit, sehingga bergantung pada *tauke*. Namun, *tauke* sering menentukan harga hasil panen secara sepihak, sehingga posisi tawar petani lemah. Kondisi ini menunjukkan pola hubungan patron-klien yang berdampak pada kesejahteraan petani. Relasi ini sejalan dengan penelitian Nuraini, Majid, dan Agusriandi (2023), yang menemukan bahwa hubungan sosial ekonomi antara petani dan *tokeh* terbentuk karena hubungan jual beli dan hutang piutang yang saling membutuhkan.

Dampak relasi terhadap kesejahteraan menunjukkan bahwa petani yang terikat dengan *tauke* memiliki pendapatan rendah karena harga jual hasil panen ditentukan oleh *tauke*. Sementara itu, petani mandiri lebih bebas menentukan harga dan memperoleh keuntungan yang lebih stabil. Hasil ini sesuai dengan teori patron-klien bahwa klien sering tidak memiliki kekuatan tawar untuk menolak kebijakan patron (Scott, 1972). Dengan demikian, relasi sosial ekonomi antara petani dan *tauke* memiliki dua sisi: memberikan kemudahan akses modal dan pasar, namun juga menimbulkan ketergantungan.

Selanjutnya, untuk menciptakan pengelolaan usaha KJA yang adil dan berkelanjutan, muncul tiga gagasan utama; (1) penguatan kelembagaan asosiasi petani KJA agar posisi tawar mereka meningkat, sebagaimana dijelaskan Nugroho (2025), bahwa kelembagaan berbasis koperasi dapat memperkuat jaringan pasar dan mengurangi ketergantungan pada patron, (2) keterlibatan pemerintah dalam mengatur sistem permodalan dan distribusi hasil panen agar petani tidak sepenuhnya bergantung pada *tauke*. Sebagaimana OECD (2023) menekankan pentingnya regulasi harga dan subsidi input untuk menciptakan agribisnis berkelanjutan, dan (3) transparansi kemitraan dengan *tauke* melalui perjanjian tertulis dan sistem pembayaran terbuka agar hubungan menjadi lebih adil dan saling menguntungkan (Napitupulu dkk, 2025).

Kesimpulan

Penelitian mengenai relasi petani KJA dengan *tauke* di Haranggaol Horisan menunjukkan tiga poin utama; bentuk relasi sosial dan ekonomi petani KJA dengan *tauke* terbagi ke dalam dua pola besar, yaitu petani ikan mandiri dan petani ikan yang terikat atau bermitra dengan *tauke*. Petani yang terikat atau bermitra dengan *tauke* terbentuk karena keterbatasan modal petani sehingga bergantung pada *tauke* yang menyediakan pakan, bibit, dan modal tunai. Namun, konsekuensi dari pola ini adalah petani wajib menjual hasil panennya kepada *tauke* dengan harga yang ditentukan sepihak, sehingga posisi tawar petani sangat lemah. Sebaliknya, relasi mandiri dilakukan

oleh petani yang memiliki modal sendiri sehingga menjual hasil panen ke pasar atau pabrik dengan harga lebih tinggi.

Meskipun demikian, pola ini juga mengandung risiko besar karena petani harus menanggung sendiri ketidakpastian harga pasar. Kemudian, Dampak relasi terhadap kesejahteraan petani menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata. Petani yang terikat dengan tauke cenderung mengalami kesejahteraan rendah karena sebagian besar hasil panen dipotong untuk membayar hutang, sehingga penghasilan bersih tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi ini membuat usaha yang dijalankan stagnan bahkan sulit berkembang. Sementara itu, petani mandiri relatif lebih sejahtera karena memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan pembeli. Terakhir, pengelolaan usaha KJA yang adil dan berkelanjutan memerlukan: (1) penguatan kelembagaan petani melalui koperasi atau asosiasi, (2) keterlibatan pemerintah dalam regulasi harga dan penyediaan subsidi, serta (3) transparansi kemitraan melalui kesepakatan tertulis agar hubungan antara petani dan *tauke* berjalan lebih adil dan saling menguntungkan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama karena ruang lingkupnya hanya berfokus pada wilayah Haranggaol Horisan dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan belum dapat menggambarkan kondisi petani KJA di daerah lain. Penelitian ini juga lebih menyoroti aspek sosial-ekonomi tanpa mengkaji secara mendalam pengaruh kebijakan pemerintah, dinamika pasar regional, atau peran lembaga keuangan yang turut membentuk relasi petani dan tauke. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian di masa depan berpeluang memperluas wilayah studi, menambah jumlah informan, serta menganalisis aspek kebijakan, mekanisme pasar, dan perbandingan pola kemitraan di berbagai daerah agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para petani KJA, para *tauke*, serta pihak pemerintah Kelurahan Haranggaol Horisan yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun akademik sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Referensi

- Adam, Lukman. (2016). Telaah kebijakan perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan di Indonesia. *Kajian*, 20(2), 145–162.
- Andriani, Gita Wahyu., Hasibuan, M Rizky., Damanik, Riska Handayani., dan Hasibuan, Abdurrozzaq. (2023). Dampak budidaya keramba jaring apung terhadap lingkungan Danau Toba di kabupaten Simalungun. *Criss-border*, 6(2), 1113-1119.
- Damanik, Erond L. (2023). *Tolu Sahundulan & Lima Saodoran: Struktur dan Fungsi Kekerabatan Triangular dan Pentagonal Simalungun*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond L. (2018). *Potret Simalungun tempoe doeloe: Menafsir kebudayaan lewat foto*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond L. (2016). *Ritus peralihan: Upacara adat Simalungun seputar kelahiran, perkawinan, penghormatan kepada orangtua dan kematian*. Medan: Simetri Institute.
- Fatimah, Sri., Syazanani, T., Yusuf, Mutiara., dan Hasibuan, Abdurrozzaq. (2023). Pemanfaatan dan dampak budidaya keramba jaring apung terhadap lingkungan di Kecamatan Haranggaol. *Cross-border*, 6(2), 1048–1054.

- Kaufman, Robert R. (1974). The patron-client concept and macro-politics: Prospects and problems. *Comparative Studies in Society and History*, 16(3), 284–308. <http://www.jstor.org/stable/178267>
- Harefa, Winda., Hendrik., dan Darwis. (2021). Perbandingan pendapatan pemilik keramba jaring apung (KJA) ikan nila dan ikan mas skala kecil di Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 2(2), 7–15.
- Mulyati, Tri. (2022). *Peran tauke dalam meningkatkan pendapatan petani pinang dalam perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Seberang Tembilahan* (Disertasi Doktor, STAI Auliaurasyidin Tembilahan).
- Nuraini, Majid Nazory., dan Agusriandi. (2023). Relasi sosial ekonomi antara petani dengan tokeh kelapa di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(2), 304–321. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1813>
- Raco, Jozef. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Scott, James C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *The American Political Science Review*, 66(1), 91–113. <https://doi.org/10.2307/1959280>
- Sibarani, Adinda Azima Riskiya., Anisa., Aprida., Dea., Lutfiah., Asiyah, Nur., Rahmi., Sandiyatun., Silvina., Wanda., dan Ayu, Delfriana. (2023). Hubungan stratifikasi sosial terhadap variabel ekonomi pada masyarakat nelayan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 552–559.
- Sidiq, Umar., dan Choiri, Miftachul. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Siregar, Rizky Pandapotan., Kusai., dan Nugroho, Firman. (2020). Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga pembudidaya keramba jaring apung (KJA) di Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 1(3), 68–75.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong., dan Sutinah. (2023). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Kencana.